

## RINGKASAN

**Silfia Tumangger**  
NIM 190510048

**Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Longging (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat)**

**(Dr. Arnita S.H., M.H. Dan Hadi Iskandar, S.H., M.H.)**

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* (Studi Penelitian Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat), Hutan merupakan sumber daya yang wajib dilindungi dari tindakan yang merusak hutan seperti kegiatan *Illegal Logging*, namun kenyatannya di kabupaten pakpak bharat masih saja terjadi *illegal logging*, kewenangan dinas kehutanan untuk menanggulangi *illegal logging* belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dinas kehutanan kabupten pakpak bharat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh dinas kehutanan kabupaten pakpak bharat dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*

Metode penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. metode yang dipakai yakni wawancara, pengamatan, dan mengumpulkan buku-buku, artikel, undang-undang, dan sumber yang berkaitan dengan judul yang diteliti. Sumber data penelitian bersumber pada data primer dan data sekunder, data diperoleh melalui kegiatan lapangan, dan kegiatan kepustakaan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kabupaten pakpak bharat dari mulainya ada laporan, pemeriksaan oleh Polisi hutan dan dinas kehutanan. Patroli kesetiap hutan yang mengalami kerusakan, tetapi dalam penerapan tersebut belum maksimal karena terdapat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* tersebut adalah terkait Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak dari kegiatan tersebut, petugas kehutanan polisi hutan sangat minim Kurangnya sarana pendukung untuk patroli untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pakpak Bharat.

Kepada pemerintah untuk meninjau Kembali peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang kehutanan yang masih kurang maksimal untuk mencegah terjadinya *illegal logging* di kabupaten Pakpak Bharat, terutama pertauran daerah yang membahas tentang fungsi atau tugas dari Dinas Kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat yang belum sesuai dengan keadaan kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat. Masyarakat dapat menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon secara berlebihan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi karena akan mengakibatkan banyak kerugian serta bencana alam yang merugikan Masyarakat itu sendiri seperti; Banjir,tanah longsor dan lain-lain, Pemerintah lebih bijak memberantas *illegal logging* dengan cara maksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mecurigai bahwa semua kayu yang diambil oleh Masyarakat berasal dari hutan, selain itu pemerintah juga harus lebih giat untuk mengsosialisasikan mengenai segala aspek dari tindak pidana *illegal logging*.

***Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Ilegal Logging***

## SUMMARY

**Silfia Tumangger**  
NIM 190510048

**AUTHORITY OF THE FORESTRY SERVICE TO  
OVERCOME ILLEGAL CRIMINAL ACTS  
LOGGING (RESEARCH STUDY FORESTRY  
SERVICES PAKPAK BHARAT DISTRICT)**

**(DR. Arnita, S.H., M.H. and Hadi Iskandar, S.H., M.  
H.)**

*Forests have a very important position and role in supporting national development, the authority of the forestry service in tackling criminal acts of illegal logging (Pakpak Bharat Regency Forestry Service Research Study), Forests are a resource that must be protected from actions that damage forests such as Illegal Logging activities, however In fact, in Pakpak Bharat district, illegal logging still occurs, the authority of the forestry service to tackle illegal logging is not yet optimal. This research aims to determine the obstacles faced by the Pakpak Bharat District Forestry Service in tackling illegal logging crimes, to find out what efforts are being made by the Pakpak Bharat District Forestry Service in tackling illegal logging crimes.*

*The research method used to solve this problem uses empirical jurisprudence using a qualitative approach. The methods used are interviews, observations, and collecting books, articles, laws, and sources related to the title being researched.*

*The results of this research are the authority of the forestry service in dealing with illegal logging crimes in Pakpak Bharat district from the start of reports, inspections by forest police and the forestry service. Patrol every forest that has experienced damage, but the implementation is not optimal because there are several obstacles or barriers to the implementation of tackling the crime of illegal logging, which is related to the lack of public awareness about the importance of forests and the impact of these activities, forestry officers and forest police are very minimal. Lack of supporting facilities to patrol to tackle illegal logging crimes in Pakpak Bharat Regency.*

*It is recommended that forestry service agencies, both regional governments, give orders and advice or outreach to the community so that people do not carry out illegal logging in forest areas, whether protected forests, community forests or production forests, such as conducting outreach every 3 or 4 months in all villages in the area. forests and outside forest areas, and invite the community to plant trees in protected forests, and further increase Forest Police (POLHUT) personnel, and provide facilities for patrolling forest areas, and the community must also participate in protecting forest areas for environmental sustainability.*

*forests or production forests, such as conducting outreach every 3 or 4 months in all villages and in remote areas, and invite the community to plant trees in protected forests, and provide outreach about the sanctions for carrying out these activities and what effects will occur if carrying out activities that damage the forest. The forestry service must also form a special unit from among the community to assist the forestry service so that it can reach out to or receive reports if there is forest damage in Pakpak Bharat Regency*

***Keywords: Authority of the Forestry Service in Handling Actions Criminal Illegal logging in Pakpak Bharat Regency***